

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pemerintah daerah (penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan anggaran berbasis kinerja telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, serta aspek disusun dengan pendekatan kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa SKPD yang masih kurang memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran dan kurang profesionalisme aparatur pemerintah, seperti kurang kompetennya aparatur pemerintah dalam mengerjakan tugas yang menjadi kewajibannya.
2. Akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam bentuk akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial secara garis besar sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, meskipun dalam

pelaksanaannya, masih ada aspek yang belum secara optimal dilaksanakan, yaitu akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan karena terkadang kebijakan yang ditetapkan pemerintah bersinggungan dengan wilayah politik yang menyebabkan kebijakan tidak dapat diterima oleh setiap kalangan.

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pemerintah daerah. Dari hasil tersebut dapat diritikan bahwa jika penerapan anggaran berbasis kinerja semakin ditingkatkan maka akan diringi dengan peningkatan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan cara menyesuaikan antara tugas aparatur pemerintah dengan latar belakang pendidikannya sehingga diharapkan aparatur pemerintah lebih berkompeten dalam mengerjakan tugasnya, dan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan hendaknya Pemerintah Daerah Kota Bandung mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur pemerintah terutama SDM keuangan serta mengadakan evaluasi pencapaian target dari hasil pelatihan yang dilakukannya

agar dapat dilihat sejauh mana perkembangan kompetensi yang dimiliki aparaturn pemerintahan sehingga bisa terus ditingkatkan keahliannya dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan sejenis, maka sebaiknya menambah variabel penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas publik, seperti kepemimpinan dan kompetensi aparaturn pemerintah karena faktor kepemimpinan dan kompetensi aparaturn pemerintah juga memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Selain itu pula peneliti selanjutnya dapat pula melakukan penelitian pada subjek lain yang lebih luas. Selain itu pula dalam melakukan penelitian sebaiknya meminimalisir tingkat subjektivitas dengan cara menerapkan konsistensi diri dalam melakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.